

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 6, July 2025, P. 719-725

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16644720>

Konsep Dasar Analisis Kebijakan dan Problematika Pendidikan

Anjellie Dasviana Putri, Sri Wahyuni, Mutya Istikarani, Lisaryadi, Muhammad Yusup

Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Universitas Islam Batanghari

Email: anjelliedasvianaputri@gmail.com, enikwahyuni282@gmail.com, mutyaistikarani@gmail.com,
lisaryadiisa@yahoo.co.id, yusup9253@gmail.com

Abstrak

Problematika pendidikan selalu bermunculan dan kerap diusahakan untuk diselesaikan. Namun, beragam usaha yang dilakukan untuk mengembangkan pendidikan itu tidak selalu berjalan dengan lancar dan mulus karena ada beragam rintangan yang menjadi kendala dan menghambat proses dari usaha tersebut. Maka, dalam makalah ini akan dibahas mengenai konsep dasar analisis kebijakan dan prolematika pendidikan. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang dibuat dengan memperhatikan hubungan pendidikan dengan komponen sosial lainnya. Oleh karena itu, mirip dengan analisis kebijakan di bidang lain, karakter kontekstual dan interdisipliner ini adalah ciri dari analisis kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan adalah upaya untuk menciptakan dan mengelola informasi (yang berkaitan) dengan memanfaatkan ilmu sosial terapan. Selain itu, di Indonesia terdapat tantangan sosial dan ekonomi yang berkontribusi pada perkembangan pendidikan, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan kendala dalam pemerataan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat, yang mengakibatkan ketidakmerataan dalam kesempatan belajar. Menyangkut hal ini, masih ada banyak sekolah yang tidak memadai sehingga lembaga pendidikan tersebut tertinggal jauh dibandingkan sekolah lain, contohnya di desa-desa terpencil.

Kata kunci: Kebijakan, Problematika, Pendidikan

Abstract

Problematics of education always arise and almost try to solve them. However, the various efforts undertaken to develop education are not always going smoothly and seamlessly as there are various obstacles that hinder and hinder the process of such efforts. Therefore, this paper will discuss regarding the basic concepts of policy analysis and educational prolemtatics. The results of this study show that educational policies are the result of decisions made paying attention to the relationship of education with other social components. Therefore, similar to policy analysis in other areas, this contextual and interdisciplinary character is characteristic of education policy analysis. Policy analysis is an attempt to create and manage (relevant) information by utilizing applied social science. Additionally, in Indonesia there are social and economic challenges that contribute to educational development, such as high poverty rates and constraints in leveling access to education for all strata of society, resulting in inequality in learning opportunities. Regarding this, there are still many inadequate schools so that the educational institutions lag far behind compared to other schools, for example in remote villages.

Keywords: Policy, Problematics, Education

Article Info

Received date: 25 June 2025

Revised date: 27 June 2025

Accepted date: 23 July 2025

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan merupakan upaya terencana dan sadar untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam memiliki kekuatan spiritual dalam agama, pengendalian diri, karakter, kecerdasan, akhlak yang baik, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Kebijakan pendidikan Indonesia telah banyak berubah untuk mencerminkan perubahan lanskap sosial, ekonomi, dan budaya negara. Pemerintah telah menerapkan sejumlah inisiatif dan langkah untuk mengatasi permasalahan terkait pendidikan sejak era reformasi, seperti mewajibkan pendidikan, meningkatkan mutu guru, dan meningkatkan fasilitas sekolah. Namun, efektivitas aturan-aturan ini seringkali dipertanyakan, terutama dalam pelaksanaannya. Karena itu, sangat penting untuk melakukan

analisis mendalam terhadap kebijakan yang tersedia, agar dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut berhasil menangani isu-isu pendidikan.¹

Tindakan menghasilkan informasi tentang pendidikan dan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai masukan untuk menciptakan berbagai pilihan kebijakan bagi pengambilan keputusan politik dalam upaya mengatasi isu-isu pendidikan dikenal sebagai analisis kebijakan pendidikan. Penggunaan ilmu sosial terapan untuk menghasilkan dan menganalisis data (terkait) dikenal sebagai analisis kebijakan. Berbagai argumen dan metode investigasi digunakan untuk mengatasi isu-isu pendidikan dalam konteks politik khusus ini.²

Problematika pendidikan selalu bermunculan dan kerap diusahakan untuk diselesaikan. Namun, beragam usaha yang dilakukan untuk mengembangkan pendidikan itu tidak selalu berjalan dengan lancar dan mulus karena ada beragam rintangan yang menjadi kendala dan menghambat proses dari usaha tersebut. Maka, dalam makalah ini akan dibahas mengenai konsep dasar analisis kebijakan dan problematika pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan di Indonesia telah melalui banyak perubahan sejalan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung. Sejak masa reformasi, pemerintah telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan untuk menangani isu pendidikan, termasuk program wajib belajar, peningkatan kualitas guru, dan perbaikan infrastruktur sekolah. Akan tetapi, keefektifan kebijakan-kebijakan itu sering kali diragukan, terutama dalam aspek pelaksanaannya di lapangan. Karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan yang tersedia, agar dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut berhasil menangani isu-isu pendidikan.³

Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang dibuat dengan memperhatikan hubungan pendidikan dengan komponen sosial lainnya. Oleh karena itu, mirip dengan analisis kebijakan di bidang lain, karakter kontekstual dan interdisipliner ini adalah ciri dari analisis kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan adalah upaya untuk menciptakan dan mengelola informasi (yang berkaitan) dengan memanfaatkan ilmu sosial terapan. Dalam situasi politik tertentu, masalah pendidikan diatasi melalui metode inquiri dan penggunaan argumen ganda. Oleh sebab itu, analisis kebijakan pendidikan merupakan upaya dengan karakteristik yang telah disebutkan sebelumnya yang diterapkan di dalam sektor pendidikan.⁴

Dalam mengambil kebijakan untuk pendidikan dibutuhkan sikap yang fleksibilitas yang juga tercantum pada Al-Qur'an yaitu pada surah Al-Hajj//22:78 sebagai berikut.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ آجِبُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

Selanjutnya Allah swt. berfirman dalam surah Al-Baqarah /2:15 yang berbunyi sebagai berikut.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : “Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesukaran bagimu”

Penjelasannya adalah jika diperlukan pemimpin atau pengelola yang berani mengambil kebijakan atau memutuskan hal-hal yang berbeda dengan tuntutan/petunjuk formal dari atas, maka untuk menghidupkan kreativitas para pengelola lembaga pendidikan memerlukan pengembangan evaluasi yang tidak semata-mata berorientasi pada proses, tetapi juga dapat dipahami pada produk dan hasil yang

¹ Dahyanti, Nur, dkk.2025. *Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia*. Riau: Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam Volume 2, Nomor 1, Tahun 2025. Hlm.88.

² Darsyah, Syukron, dan Chanifudin.2020. *Kebijakan dalam Pendidikan*. Selatpanjang: At-Thullab: Jurnal of Islamic Studies. Vol 1(1), June 2020. Hlm.121.

³ Dahyanti, Nur, dkk.2025. *Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia*. Riau: Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam Volume 2, Nomor 1, Tahun 2025. Hlm.88.

⁴ Darsyah, Syukron, dan Chanifudin.2020. *Kebijakan dalam Pendidikan*. Selatpanjang: At-Thullab: Jurnal of Islamic Studies. Vol 1(1), June 2020. Hlm.121.

akan dicapai, jika pandangan ini dipahami, maka manajemen dalam hal ini kinerja manajer atau pemimpin pendidikan tidak hanya diukur dengan menggunakan telah terlaksana program yang ada, tetapi lebih dari itu adalah sejauh mana pelaksanaan itu melahirkan produk-produk yang diinginkan oleh berbagai pihak.⁵

Analisis kebijakan pada dasarnya bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Proses analisis kebijakan memiliki kemampuan untuk memperkirakan konsekuensi yang akan muncul jika alternatif yang dipilih diimplementasikan. Selain itu, analisis ini juga dapat mengevaluasi dampak dari kebijakan yang diterapkan, serta mempertimbangkan tantangan yang mungkin timbul dalam situasi politik, sosial, dan budaya jika kebijakan alternatif tidak dilaksanakan. Dalam analisis kebijakan, terdapat deskripsi mengenai kebijakan yang sedang dan akan dilaksanakan, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif. Proses analisis kebijakan biasanya meliputi lima tahapan, yaitu: perumusan masalah, perumusan alternatif kebijakan (prediksi), rekomendasi penerapan kebijakan (preskripsi), pemantauan kebijakan (deskripsi), dan evaluasi kinerja kebijakan. Penjelasan yang lebih mendalam mengenai tahapan-tahapan analisis kebijakan akan diuraikan dalam bahasan tersendiri.⁶

Terdapat tiga tahapan dalam kebijakan, yaitu: perumusan, pelaksanaan, dan penilaian. Ketiga proses tersebut dijelaskan agar pemahaman mengenai makna kebijakan sebagai suatu proses manajemen dapat dilakukan secara holistik. Langkah awal dimulai dengan penyusunan kebijakan. Rumusan atau penyusunan kebijakan dalam pemerintahan melibatkan kegiatan politik. Dalam konteks ini, aktivitas politik diartikan sebagai pembuatan kebijakan yang tergambar. Aktivitas politik terdiri dari serangkaian tahap yang saling terkait dan diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Rancangan atau formulasi kebijakan mengandung beberapa elemen penting yang dijadikan sebagai acuan tindakan sesuai rencana yang mencakup kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, tipe dan manfaat yang dihasilkan, pelaksanaan program serta sumber daya yang dimobilisasi. Tahap kedua adalah pelaksanaan kebijakan, yang pada dasarnya adalah metode yang diterapkan agar suatu kebijakan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Tahap ketiga dalam proses kebijakan adalah penilaian. Penilaian kebijakan dilakukan sebagai suatu proses untuk memahami sejauh mana efektivitas kebijakan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dengan kata lain, seberapa jauh tujuan kebijakan itu telah berhasil dicapai. Di sisi lain, evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara ekspektasi atau target dengan realitas yang dicapai.⁷

Analisis kebijakan pendidikan harus didasarkan pada prinsip yang objektif, bukan semata-mata untuk mengkritik kebijakan pendidikan oleh pemerintah yang berkuasa, atau pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun juga memberikan gambaran yang memungkinkan tentang perbaikan kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara pendidikan. Tentu saja, ini memerlukan pendekatan ilmiah yang objektif dan tepat.⁸

Kebijakan pendidikan memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya berbeda dengan kebijakan lain, diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Mempunyai sasaran pendidikan
Sebuah kebijakan pendidikan perlu menetapkan tujuan tertentu yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Sasaran pendidikan yang ditetapkan harus lebih fokus dan jelas serta memberikan pemahaman tentang sumbangan bagi dunia pendidikan.
- b. Memenuhi aspek hukum dan formal
Sebelum kebijakan pendidikan diterapkan, penting untuk memenuhi syarat-syarat agar kebijakan tersebut sah dan diakui. Oleh karena itu, pentingnya kebijakan tersebut disahkan melalui ketentuan konstitusi yang relevan, sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku, agar tercipta legitimasi kebijakan pendidikan.

⁵ Hidayat, Rahmat, dan candra Wijaya. 2017. *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*. Medan : Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).

⁶ Arwildayanto, Arifin Suking, dan Warni Tune Sumar. 2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung : CV Cendikia Press.

⁷ Arifin, Nur Rizqi, dkk. 2024. *Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan dan Kinerja Birokrasi (KPKB)*. Bandung : Jurnal Wahana Pendidikan, 11(2), Agustus 2024.

⁸ Mahardika, Hendra, Khusnul Chotimah, dan Muhammad Dzaki. 2023. *Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta : Jurnal el-Fakhr, Islamic Education, Teaching and Studies Vol.3 No.1, Desember 2023

- c. Mempunyai konsep yang berlaku secara operasional
Kebijakan pendidikan adalah rangkaian pedoman yang bersifat umum. Oleh karena itu, suatu kebijakan pendidikan perlu memiliki kegunaan praktis yang bisa diimplementasikan.
- d. Konsep yang dijalankan
Ini perlu dimiliki agar pencapaian sasaran bisa diukur dengan jelas. Dirumuskan oleh pihak yang berwenang Kebijakan pendidikan disusun dan dibuat oleh para ahli yang memiliki hak dan kekuasaan dalam penyusunan kebijakan. Tujuan dari hal ini adalah untuk mencegah munculnya masalah baru yang disebabkan oleh kebijakan tersebut.
- e. Bisa dievaluasi
Kebijakan pendidikan harus dapat dinilai. Sebuah kebijakan yang baik akan bisa dikembangkan lebih lanjut. Jika terdapat kesalahan dalam kebijakan tersebut, maka harus bisa diperbaiki.
- f. Mempunyai sistematika
Kebijakan pendidikan memiliki sistematika yang berkaitan dengan semua aspek yang ada di dalamnya. Sistematika perlu mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan. Kebijakan juga harus memiliki sifat yang tidak pragmatis dan diskriminatif. Kebijakan juga tidak boleh memiliki struktur yang lemah. Tujuannya adalah agar kebijakan yang dihasilkan tidak memiliki cacat hukum baik dari segi internal maupun eksternal.⁹

Dalam menganalisis kebijakan pendidikan, ada beberapa nilai yang signifikan untuk diperhatikan. Berikut adalah sejumlah nilai yang biasanya diperhatikan dalam analisis kebijakan pendidikan:

- a. Aksesibilitas: Kebijakan pendidikan perlu memprioritaskan akses yang setara bagi semua orang tanpa memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, atau disabilitas. Setiap orang harus mempunyai peluang yang setara untuk menerima pendidikan yang bermutu.
- b. Kesetaraan: Prinsip kesetaraan menekankan perlunya memberikan akses yang setara kepada seluruh peserta didik. Kebijakan pendidikan perlu menangani ketidaksetaraan dan diskriminasi yang mungkin muncul dalam sistem pendidikan.
- c. Kualitas: Penekanan pada mutu pendidikan merupakan aspek signifikan dalam evaluasi kebijakan. Kebijakan pendidikan perlu mendukung peningkatan mutu pendidikan, mencakup mutu pengajar, kurikulum, dan sarana pendidikan. Pendidikan yang berkualitas tinggi akan menghasilkan hasil yang lebih baik untuk siswa.
- d. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pendidikan sangatlah penting. Ini mencakup guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan pakar pendidikan. Dengan melibatkan mereka, kebijakan yang dihasilkan akan lebih kuat dan cenderung diimplementasikan dengan lebih efektif.
- e. Keberlanjutan: Kebijakan pendidikan perlu disusun dengan memperhatikan keberlanjutan untuk jangka panjang. Ini meliputi faktor keuangan, kebijakan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu, serta adaptasi dan inovasi untuk menghadapi perubahan yang berlangsung dalam masyarakat dan dunia pendidikan.
- f. Relevansi: Kebijakan pendidikan perlu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman saat ini. Ini meliputi perancangan kurikulum yang sesuai dengan industri, kemajuan teknologi, serta perubahan sosial yang berlangsung.
- g. Pemerataan: Sangat penting untuk menjamin pemerataan pendidikan di semua daerah dan komunitas. Tidak boleh terdapat perbedaan yang mencolok antara kawasan kota dan desa, serta antara area yang makmur dan yang kurang mampu.
- h. Inklusi: Konsep inklusi menekankan pentingnya melibatkan semua orang, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus. Kebijakan pendidikan perlu menjamin bahwa tidak ada diskriminasi dan semua orang memiliki peluang yang setara untuk belajar.
- i. Kebebasan akademis: Penting untuk melindungi kebebasan akademis dalam sistem pendidikan. Guru dan siswa perlu memiliki kebebasan untuk mengungkapkan, menerima, dan menjelajahi berbagai ide dan metode dalam konteks pembelajaran.¹⁰

⁹ Rahman, Hardianto. 2014. *Miskonsepsi Pendidikan Gratis*. Sumatera Selatan : Al-Qalam Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan Volume 06 No.1 2014.

¹⁰ Rahmat. 2019. *Pendidikan Agama Islam*. Malang : Literasi Nusantara

Problematika Pendidikan

Problematika secara etimologi berasal dari istilah “*problem*” yang berarti “masalah atau persoalan”. Maka problematika merujuk pada hal-hal yang menimbulkan isu yang masih belum dapat diselesaikan. Dalam kamus ilmiah yang umum, problema diartikan sebagai soal, masalah, perkara sulit, dan persoalan.

Kemajuan dan perkembangan suatu negara ditentukan oleh mutu sumber daya manusia bangsa itu. Dengan adanya pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia tersebut agar mampu bersaing dengan negara-negara lain. Indonesia, yang pada dasarnya merupakan negara berkembang, tentunya bisa menjadi negara maju jika sistem pendidikannya sudah berjalan dengan baik dan semestinya. Namun, dalam kenyataan, pendidikan di Indonesia mengalami penurunan sehingga kualitas pendidikan di negara ini berada pada tingkat terendah dibandingkan dengan negara-negara lain.¹¹

Saat ini, masyarakat Indonesia lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Selain itu, rendahnya kualitas guru dan kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja juga menghalangi kemajuan pendidikan. Tantangan sosial dan ekonomi juga berkontribusi pada perkembangan pendidikan, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan kendala dalam pemerataan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat, yang mengakibatkan ketidakmerataan dalam kesempatan belajar. Menyangkut hal ini, masih ada banyak sekolah yang tidak memadai sehingga lembaga pendidikan tersebut tertinggal jauh dibandingkan sekolah lain, contohnya di desa-desa terpencil.¹²

Ada beberapa fenomena yang tercatat oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Pendidikan Islam sering kali tidak cepat menyusun diri untuk menanggapi perubahan dan kecenderungan perkembangan masyarakat, baik saat ini maupun di masa depan.
- b. Sistem pendidikan Islam umumnya masih lebih memfokuskan diri pada bidang humaniora dan ilmu sosial dibandingkan dengan ilmu eksakta seperti fisika, kimia, biologi, dan matematika modern. Sebenarnya pengetahuan ini sangat diperlukan untuk mengembangkan teknologi canggih. Selain itu, ilmu-ilmu eksakta ini belum mendapatkan pengakuan dan posisi yang semestinya dalam sistem pendidikan Islam.
- c. Usaha untuk memperbaharui dan meningkatkan sistem pendidikan Islam sering kali bersifat parsial atau tidak menyeluruh dan komprehensif, yang dilakukan secara sembarangan atau hanya diingat, sehingga perubahan esensial tidak terjadi di dalamnya.
- d. Sistem pendidikan Islam masih lebih fokus pada masa lalu dibandingkan dengan masa depan, atau kurang bersifat proyektif.
- e. Sebagian besar sistem pendidikan Islam masih belum dikelola secara profesional, baik dalam hal perencanaan, persiapan tenaga pengajar, kurikulum, maupun pelaksanaan pendidikan, sehingga tidak mampu bersaing dengan yang lain.
- f. Dunia pendidikan Islam kini terjankit penyakit *simtomdikotomik*, dan *spirit of inquiry*.
- g. Kurang berkembangnya konsep humanisme religius dalam dunia pendidikan Islam, yakni adanya tendensi pendidikan Islam yang lebih berorientasi pada konsep “abdullah” daripada “khalifatullah” dan “hablun minallah” daripada “hablun minannas”.
- h. Terdapat orientasi pendidikan yang tidak seimbang, sehingga menghasilkan masalah besar dalam bidang pendidikan Islam, mulai dari isu filosofis hingga metodologis, bahkan sampai ke tradisi pembelajaran.¹³

Permasalahan pendidikan agama untuk siswa madrasah sebenarnya hampir umumnya serupa. Tipe kesamaan dari masalah tersebut terutama berkaitan dengan kurangnya internalisasi nilai-nilai agama dalam diri siswa. Siswa baru sedang diajari tentang agama, tetapi belum mencapai tahap di mana mereka diajari cara untuk beragama. Untuk mengatasi masalah yang ada, selain pendekatan yang sudah dicoba seperti perbaikan dan penyesuaian kurikulum, dibutuhkan solusi alternatif yang lebih menekankan pada kesadaran dan pemahaman mendalam mengenai makna serta penerapan inti pelajaran agama dan cara beragama. Oleh sebab itu, tauhid sebagai pokok agama, yang pada akhirnya akan

¹¹ Idawati. 2025. *Analisis Permasalahan Pendidikan Nasional*. Makassar : J-CEKI, Jurnal Cendikia Ilmiah Vol.4 No.2, Februari 2025.

¹² Dahyanti, Nur, dkk. 2025. *Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia*. Sumatera Utara : Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam Volume 2, Nomor 1, Tahun 2025

¹³ Aslamiah, Siti Suwaibatul. 2013. *Problematika Pendidikan Islam di Indonesia*. Jawa Timur: Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman, Volume 3, Nomor 1, Maret 2013.

menghasilkan taqwa, perlu dirumuskan pada jalur yang sebenarnya agar dapat dipahami oleh siswa. Apa pun materi yang diajarkan dalam pendidikan agama di madrasah, jika semangat tauhid diajarkan dengan cara yang menyeluruh, akan sangat berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan sikap siswa.¹⁴

Problematika seperti ketidaksetaraan akses pendidikan, mutu pengajaran yang rendah, serta kurangnya infrastruktur yang memadai menjadi faktor utama yang menghalangi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Kebijakan seperti kewajiban belajar dan peningkatan kemampuan guru telah dilaksanakan, namun efektivitasnya sering kali terhalang oleh faktor-faktor eksternal, seperti dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi pelaksanaan di lapangan. Di samping itu, peranan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan juga sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Masyarakat, termasuk orang tua dan komunitas, perlu dilibatkan dalam pembuatan dan penilaian kebijakan pendidikan agar kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dan relevan dengan kebutuhan setempat. Dengan melibatkan berbagai pihak berkepentingan, diharapkan solusi yang lebih efisien dapat ditemukan untuk mengatasi masalah pendidikan. Oleh sebab itu, guna meraih mutu pendidikan yang lebih baik, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, serta institusi pendidikan.¹⁵

SIMPULAN

Berdasarkan dari pemaparan makalah ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang dibuat dengan memperhatikan hubungan pendidikan dengan komponen sosial lainnya. Oleh karena itu, mirip dengan analisis kebijakan di bidang lain, karakter kontekstual dan interdisipliner ini adalah ciri dari analisis kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan adalah upaya untuk menciptakan dan mengelola informasi (yang berkaitan) dengan memanfaatkan ilmu sosial terapan.
2. Di Indonesia terdapat tantangan sosial dan ekonomi yang berkontribusi pada perkembangan pendidikan, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan kendala dalam pemerataan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat, yang mengakibatkan ketidakmerataan dalam kesempatan belajar. Menyangkut hal ini, masih ada banyak sekolah yang tidak memadai sehingga lembaga pendidikan tersebut tertinggal jauh dibandingkan sekolah lain, contohnya di desa-desa terpencil.

REFERENSI

- Arifin, Nur Rizqi, dkk. 2024. *Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan dan Kinerja Birokrasi (KPKB)*. Bandung : Jurnal Wahana Pendidikan, 11(2), Agustus 2024.
- Arwildayanto, Arifin Suling, dan Warni Tune Sumar. 2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung : CV Cendikia Press.
- Aslamiah, Siti Suwaibatul. 2013. *Problematika Pendidikan Islam di Indonesia*. Jawa Timur: Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman, Volume 3, Nomor 1, Maret 2013.
- Dahyanti, Nur, dkk. 2025. *Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia*. Sumatera Utara : Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam Volume 2, Nomor 1, Tahun 2025.
- Darsyah, Syukron, dan Chanifudin. 2020. *Kebijakan dalam Pendidikan*. Riau : At-Thullab: Jurnal of Islamic Studies Vol.1(1), June 2020.
- Hasbi, M. 2009. *Konsep Tauhid sebagai Solusi Problematika Pendidikan Agama bagi Siswa Madrasah*. Palembang : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan INSANIA, Vol.14, No. 2.
- Hidayat, Rahmat, dan candra Wijaya. 2017. *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*. Medan : Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Idawati. 2025. *Analisis Permasalahan Pendidikan Nasional*. Makassar : J-CEKI, Jurnal Cendikia Ilmiah Vol.4 No.2, Februari 2025.
- Mahardika, Hendra, Khusnul Chotimah, dan Muhammad Dzaki. 2023. *Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta : Jurnal el-Fakhru, Islamic Education, Teaching and Studies Vol.3 No.1, Desember 2023.

¹⁴ Hasbi, M. 2009. *Konsep Tauhid sebagai Solusi Problematika Pendidikan Agama bagi Siswa Madrasah*. Palembang : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan INSANIA, Vol.14, No. 2.

¹⁵ Dahyanti, Nur, dkk. 2025. *Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia*. Sumatera Utara : Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam Volume 2, Nomor 1, Tahun 2025

- Rahman, Hardianto. 2014. *Miskonsepsi Pendidikan Gratis*. Sumatera Selatan : Al-Qalam Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan Volume 06 No.1 2014.
- Rahmat. 2019. *Pendidikan Agama Islam*. Malang : Literasi Nusantara.